



DAMPAK SOSIAL

Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Kofiau- Boo di Perairan Raja Ampat Tahun 2025

Oleh

Fitryanti Pakiding, Dariani Matualage, Indah R. Anggriyani, Dahlia
G. R. Menufandu, Trigarcia Randa, Kezia E. Salosso, Jeniffer A.
Maleke, Marthinus J. Rumere, Arnoldus S. Ananta



DAMPAK SOSIAL

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN KOFIAU-BOO

Di Perairan Raja Ampat
2025

**PROGRAM SAINS UNTUK KONSERVASI
LPPM - UNIVERSITAS PAPUA**

Fitryanti Pakiding, Dariani Matualage, Indah Ratih Anggriyani,
Dahlia G.R. Menufandu, Trigarcia Randa, Kezia E. Salosso,
Jeniffer A. Maleke, Marthinus J. Rumere, Arnoldus S. Ananta

DAMPAK SOSIAL

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN KOFIAU-BOO DI PERAIRAN RAJA AMPAT, TAHUN 2025

Penulis

Fitryanti Pakiding, Ph.D

Dariani Matualage, M.Si

Indah R. Anggriyani, M.Si

Dahlia G.R Menufandu, M.Stat.

Trigarcia M. Randa, M.Si

Kezia E. Salosso

Jeniffer A. Maleke

Marthinus J. Rumere

Arnoldus S. Ananta

Program Sains untuk Konservasi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Papua

Foto Sampul: *Nelayan Memancing di Depan Kampung Balal*

Arnoldus Ananta_*Program Sains untuk Konservasi_LPPM UNIPA*

Saran Sitasi:

Pakiding, F., D. Matualage, I.R. Anggriyani, D.G.R. Menufandu, T.M. Randa, K.E. Salosso, J.A. Maleke, M.J. Rumere, dan A.S. Ananta. 2026. Dampak Sosial Kawasan Konservasi Kepulauan Kofiau-Boo Di Perairan Raja Ampat Tahun 2025 (Laporan). Program Sains untuk Konservasi LPPM UNIPA, Manokwari.

PENGANTAR

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kepulauan Kofiau-Boo merupakan kawasan konservasi seluas 148.979 hektare yang terletak di bagian barat Raja Ampat¹. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi, termasuk terumbu karang serta jalur migrasi paus dan lumba-lumba. Selain penting bagi konservasi, kawasan ini juga menopang kehidupan masyarakat lokal yang masih menerapkan sistem adat sasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

PEMBENTUKAN KKP. Pembentukan KKP Kepulauan Kofiau-Boo berawal dari kemitraan yang dibangun pada tahun 2004 antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai organisasi konservasi untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan². Komitmen tersebut diwujudkan melalui deklarasi kawasan konservasi oleh masyarakat adat dan diperkuat melalui penetapan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2007 sebagai bagian dari jejaring kawasan konservasi laut di Raja Ampat³. Pengelolaan kawasan kemudian dikembangkan melalui penyusunan sistem zonasi yang menggabungkan kearifan lokal, termasuk praktik sasi, dengan informasi ilmiah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya perikanan. Pada tahun 2011, masyarakat dari lima kampung di Kofiau mengukuhkan dukungan terhadap zonasi kawasan melalui upacara adat yang didukung oleh pemerintah daerah. Perlindungan kawasan selanjutnya diperkuat melalui penyempurnaan regulasi daerah dan integrasi ke dalam sistem kawasan konservasi nasional. Saat ini, KKP Kepulauan Kofiau-Boo ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 dengan luas 137.318,73 hektare⁴.

KONTEKS SOSIAL⁵. Mayoritas jenis pekerjaan utama yang ditemukan pada pemantauan saat ini, baik di wilayah KKP maupun wilayah kontrol, adalah bertani. Di wilayah KKP, pekerjaan utama yang paling banyak dilakukan rumah tangga adalah bertani, yaitu sebesar 67,94% dan 73,33% di wilayah kontrol. Sementara itu, rumah tangga yang menjadikan melaut sebagai pekerjaan utama tercatat sebesar 12,44% di wilayah KKP dan 18,67% di wilayah kontrol.

Meskipun jenis pekerjaan utama rumah tangga di wilayah KKP dan wilayah kontrol adalah bertani, aktivitas melaut tetap menjadi kegiatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat pesisir. Sebanyak 53,80% rumah tangga di wilayah KKP dan 53,97% rumah tangga di wilayah kontrol melakukan aktivitas melaut minimal beberapa kali dalam satu minggu. Sementara itu, proporsi rumah tangga yang tidak pernah melakukan aktivitas melaut sangat kecil, yaitu hanya sebesar 1,90% di wilayah KKP dan tidak ditemukan di wilayah kontrol.

¹ <https://kkprajaampat.com/kkp-kepulauan-kofiau-boo/>

² Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Tahun 2019 – 2038

³ Perbub Raja Ampat Nomor 05 Tahun 2009 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat

⁴ KEPMEN Kelautan & Perikanan No. 13 Tahun 2021

⁵ Pakiding dli. 2026. Laporan Status dan Tren KKP Kepulauan Kofiau-Boo Tahun 2025. Program Sains untuk Konservasi LPPM UNIPA, Manokwari.

Mayoritas rumah tangga di wilayah KKP maupun wilayah kontrol beragama Kristen. Rata-rata lama tinggal rumah tangga tercatat sebesar 41,44 tahun di wilayah KKP dan 36,81 tahun di wilayah kontrol. Akses menuju pasar utama relatif serupa pada kedua wilayah. Rata-rata waktu tempuh dari wilayah KKP ke pasar utama adalah 6,55 jam (sekitar 13 jam 23 menit), sedangkan dari wilayah kontrol adalah 3,81 jam (sekitar 6 jam 33 menit). Pasar utama yang paling sering dituju oleh rumah tangga di kedua wilayah adalah Pasar di Kota Sorong.

Perubahan ekonomi selama dua belas bulan terakhir terlihat tidak berubah, dirasakan 40,00% rumah tangga wilayah KKP dan 44,00% rumah tangga wilayah kontrol. Sebanyak 30,57% rumah tangga di wilayah KKP dan 38,10% rumah tangga di wilayah kontrol, dalam enam bulan terakhir sebagian besar dan sekitar setengah penghasilan yang didapat berasal dari kegiatan melaut. Mayoritas jenis alat tangkap sederhana yang digunakan untuk mencari ikan. Sebanyak 99,37% rumah tangga di wilayah KKP dan 95,24% rumah tangga wilayah kontrol, menggunakan alat tangkap sederhana dalam mencari ikan.

KONTEKS EKOLOGI¹. KKP Kepulauan Kofiau-Boo memiliki kekayaan sumber daya laut yang tinggi dan merupakan salah satu kawasan penting bagi konservasi keanekaragaman hayati di Raja Ampat. Kawasan ini didukung oleh sekitar 13.800 hektare terumbu karang dan 3.413 hektare hutan bakau yang menyediakan habitat penting bagi berbagai spesies laut serta menopang produktivitas perikanan. Survei di kawasan ini mencatat sedikitnya 292 jenis terumbu karang yang ditemukan pada enam titik pengamatan, mencerminkan tingginya keragaman hayati yang dimiliki kawasan ini. Kondisi terumbu karang secara umum masih tergolong baik, dengan tingkat pemutihan dan penyakit karang yang relatif rendah serta biomassa ikan yang menunjukkan fungsi ekosistem yang masih terjaga.

Selain menjadi habitat penting bagi berbagai spesies ikan karang, KKP Kepulauan Kofiau-Boo juga berfungsi sebagai koridor migrasi bagi mamalia laut. Berbagai jenis paus dan lumba-lumba tercatat memanfaatkan perairan kawasan ini, termasuk paus sperma, paus pembunuh, paus bryde, serta lumba-lumba hidung botol. Kawasan ini juga menjadi habitat bagi duyung yang bergantung pada ekosistem pesisir yang sehat. Keberadaan berbagai spesies tersebut menegaskan pentingnya Kofiau-Boo sebagai kawasan konservasi yang berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati laut sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan di Raja Ampat.

EVALUASI DAMPAK SOSIAL. Pemantauan sosial di KKP Kepulauan Kofiau-Boo merupakan bagian dari program pemantauan dan evaluasi jangka panjang di Bentang Laut Kepala Burung, yang mengukur beragam kondisi sosial dan ekologi. Pengukuran data dasar (*baseline*) untuk KKP Kepulauan Kofiau-Boo dicatat pada tahun 2011, dan data pasca data dasar dikumpulkan setiap dua tahun sampai 3 tahun.

Untuk mengidentifikasi dampak penetapan KKP terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir Kepulauan Kofiau-Boo, setiap rumah tangga dipasangkan dengan rumah tangga di luar KKP (yang disebut sebagai “kontrol”) yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis

utama yang sama. Perbandingan atribut kesejahteraan setiap rumah tangga KKP versus pengendaliannya (atau kontrol) memungkinkan kita untuk menentukan besarnya perubahan yang dapat dijelaskan oleh penetapan KKP.

Salah satu komponen dari sistem KKP yang digunakan untuk menggolongkan sifat dan dampak satu intervensi adalah kondisi kesejahteraan manusia. Lima ranah kesejahteraan manusia yang digunakan yaitu Kesejahteraan Ekonomi, Kesehatan, Pemberdayaan Politik, Budaya, dan Pendidikan. Dampak intervensi tertentu (yang juga dikenal dalam istilah evaluasi dampak sebagai ‘perlakuan’ atau treatment) didefinisikan sebagai perbedaan antara pencapaian oleh rumah tangga yang mendapat “perlakuan” (yaitu berpartisipasi dalam intervensi konservasi) dan rumah tangga yang berada dalam kelompok kontrol. Dalam laporan ini, metode analisis yang digunakan adalah model DiD (*Different in Different*) yang dirujuk dari model yang digunakan oleh (Le et.al., 2026)⁶. Dampak dari kelima ranah kesejahteraan manusia yang dihasilkan pada pemantauan tahun 2025 di KKP Kepulauan Kofiau-Boo disajikan pada Tabel 1.

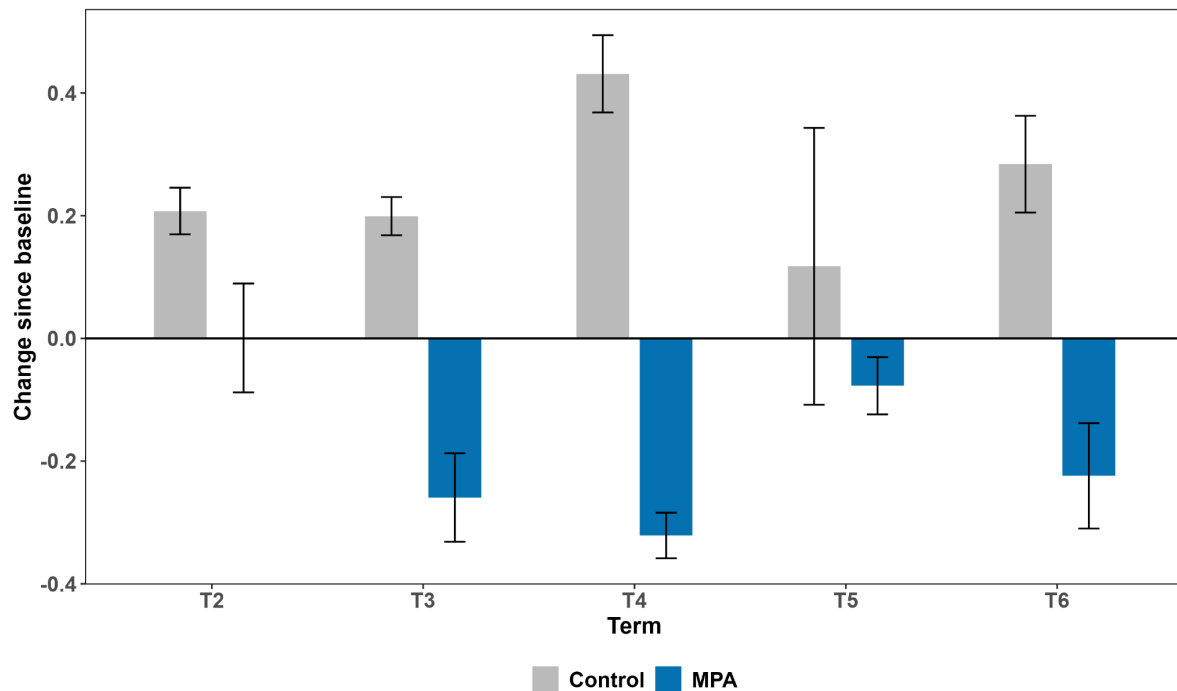
Tabel 1. Hasil Analisis Dampak terhadap Lima indikator Sosial tahun 2025

Indikator	Dampak
Kesejahteraan Ekonomi (Kepemilikan Aset Rumah Tangga)	Negatif
Kesehatan (Ketahanan Pangan Rumah Tangga)	Tidak memperlihatkan adanya dampak
Pemberdayaan Politik (Hak Pengelolaan Sumber Daya Laut)	Tidak memperlihatkan adanya dampak (Dampak negatif diawal pemantauan)
Budaya (Keterikatan Emosi terhadap Tempat)	Tidak memperlihatkan adanya dampak
Pendidikan (Angka partisipasi anak usia sekolah)	Tidak memperlihatkan adanya dampak

KKP Kepulauan Kofiau-Boo belum menunjukkan dampak sosial yang konsisten pada sebagian besar indikator kesejahteraan masyarakat. Dampak yang paling jelas terdeteksi adalah pada indikator kepemilikan aset rumah tangga, yang menunjukkan laju perubahan yang lebih rendah dibandingkan wilayah kontrol. Sementara itu, indikator ketahanan pangan, partisipasi sekolah, hak pengelolaan sumber daya laut, dan keterikatan terhadap tempat tidak menunjukkan dampak yang konsisten atau signifikan secara statistik selama periode pemantauan.

⁶ Le et.al. 2026. *Distributional effects of marine conservation on coastal livelihoods in Eastern Indonesia*. *Nature Communications*, 17(1). <https://doi.org/10.1038/s41467-026-69081-0>

CARA MEMBACA & MEMAHAMI TIPOLOGI DAMPAK



Gambar 1. Tampilan Grafik Analisis Dampak

Cara Membaca Sumbu Grafik

Sumbu Y menunjukkan besarnya perubahan nilai indikator dampak dibandingkan kondisi dasar (baseline), yang dapat berupa indeks atau persentase perubahan. Nilai positif (>0) menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi baseline, sedangkan nilai negatif (<0) menunjukkan penurunan. Nilai yang mendekati nol menunjukkan kondisi yang relatif tidak mengalami perubahan berarti dibandingkan kondisi awal. Sementara itu, sumbu X menunjukkan periode survei atau pengambilan data monitoring, dengan baseline dilakukan pada tahun 2011 dan pengulangan survei pada T2 (2013), T3 (2015), T4 (2018), T5 (2021), dan T6 (2025).

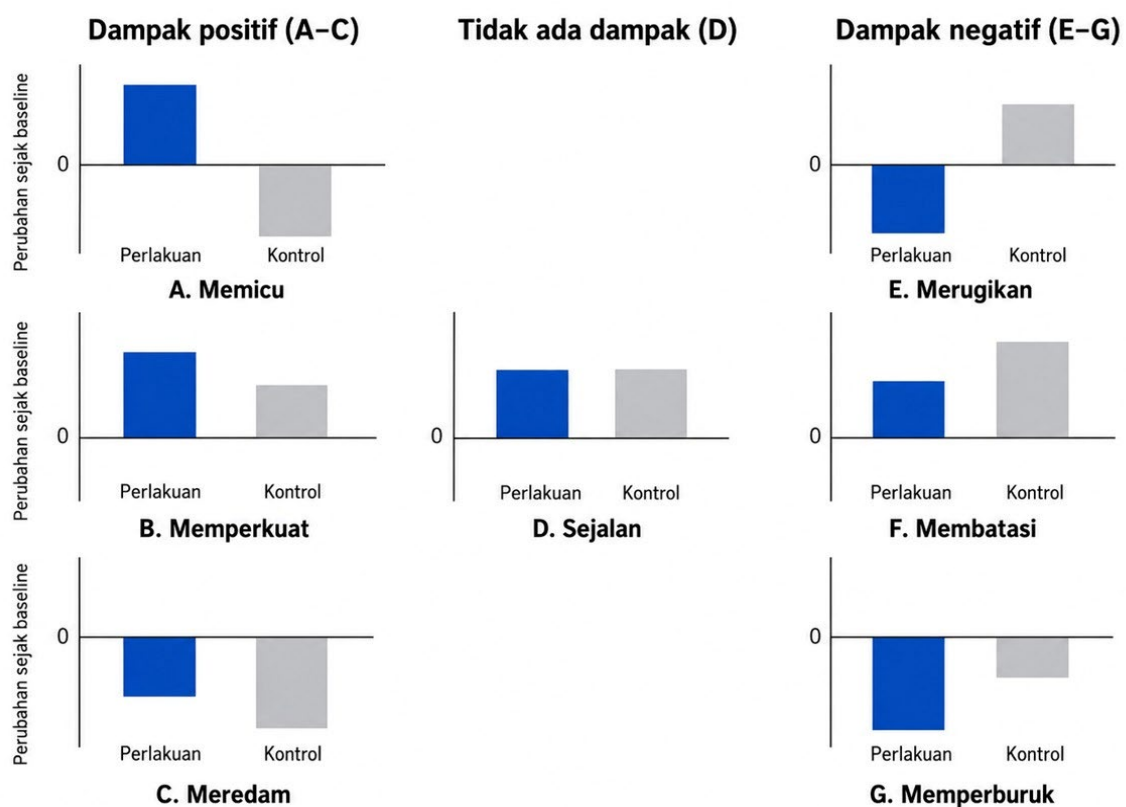
Kelompok Pembanding (Kontrol dan KKP)

Grafik membandingkan perubahan indikator dampak antara kelompok perlakuan (treatment) dan kelompok kontrol (control). Kelompok perlakuan merupakan kampung-kampung yang berada di dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP), yaitu Deer, Dibalal, Mikiran dan Tolobi. Sedangkan kelompok kontrol merepresentasikan kampung di luar KKP, yaitu Wejim Barat, Wejim Timur, Pulau Tikus dan Satukurano. Perbandingan kedua kelompok digunakan untuk membantu memahami apakah perubahan yang terjadi pada wilayah KKP menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan wilayah di luar KKP selama periode monitoring.

Interpretasi Error Bar (Variasi/Ketidakpastian Data)

Garis vertikal (*error bar*) pada setiap batang menunjukkan tingkat variasi atau ketidakpastian nilai perubahan pada masing-masing kelompok pengamatan. Error bar yang lebih pendek menunjukkan variasi data yang relatif rendah atau lebih konsisten antar lokasi/responden, sedangkan error bar yang lebih panjang menunjukkan tingkat variasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, interpretasi perubahan nilai antar kelompok maupun antar periode monitoring perlu mempertimbangkan besarnya variasi data tersebut, terutama ketika rentang error bar antar kelompok saling bertumpang tindih.

Interpretasi Pola Dampak



Gambar 2. Model Hasil Analisis dan Interpretasi Grafik Dampak

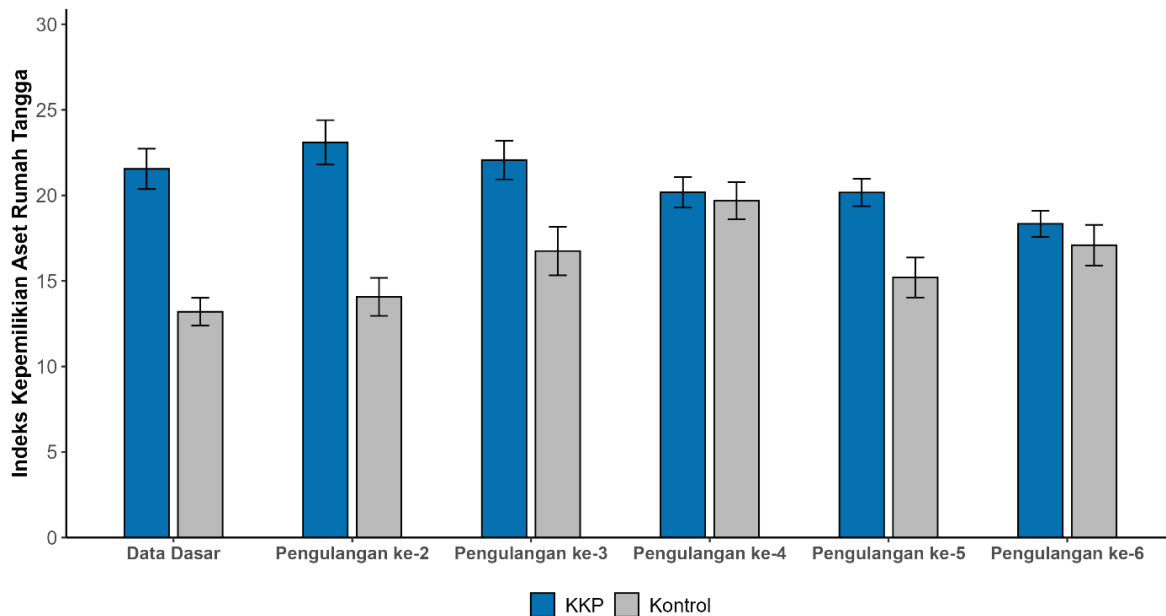
Interpretasi dampak dilakukan dengan membandingkan arah dan besarnya perubahan indikator antara kelompok perlakuan (kampung di dalam KKP) dan kelompok kontrol (kampung di luar KKP). Perbandingan ini tidak hanya melihat apakah suatu indikator meningkat atau menurun, tetapi juga apakah perubahan tersebut lebih baik atau lebih buruk dibandingkan perubahan yang terjadi pada kelompok pembandingan. Dengan pendekatan ini, dampak KKP dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh pola utama sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.

- A. Memicu (*Triggering*)** menunjukkan bahwa indikator pada kelompok perlakuan mengalami peningkatan, sementara kelompok kontrol mengalami penurunan. Pola ini mengindikasikan bahwa keberadaan atau pengelolaan KKP berkontribusi mendorong perubahan positif yang tidak terjadi pada wilayah pembanding.
- B. Memperkuat (*Amplifying*)** terjadi ketika kedua kelompok sama-sama mengalami peningkatan, tetapi peningkatan pada kelompok perlakuan lebih besar dibandingkan kelompok kontrol. Pola ini menunjukkan bahwa KKP memperkuat tren positif yang juga terjadi secara umum di wilayah sekitar.
- C. Meredam (*Buffering*)** terjadi ketika kedua kelompok mengalami penurunan, namun penurunan pada kelompok perlakuan lebih kecil dibandingkan kelompok kontrol. Dalam kondisi ini, KKP belum sepenuhnya mencegah penurunan, tetapi berperan mengurangi besarnya dampak negatif yang terjadi.
- D. Sejalan (*Parallel Change*)** menunjukkan bahwa kelompok perlakuan dan kontrol mengalami perubahan yang relatif sama. Pola ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi kemungkinan dipengaruhi oleh faktor yang lebih luas dan tidak menunjukkan adanya dampak yang berbeda secara nyata antara kedua kelompok.
- E. Merugikan (*Harming*)** terjadi ketika kelompok perlakuan mengalami penurunan, sedangkan kelompok kontrol mengalami peningkatan. Pola ini menunjukkan bahwa kondisi di wilayah perlakuan berkembang lebih buruk dibandingkan wilayah pembanding.
- F. Membatasi (*Constraining*)** terjadi ketika kedua kelompok mengalami peningkatan, namun peningkatan pada kelompok perlakuan lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun indikator membaik, laju perbaikannya relatif tertinggal dibandingkan wilayah pembanding.
- G. Memperburuk (*Exacerbating*)** terjadi ketika kedua kelompok mengalami penurunan, tetapi penurunan pada kelompok perlakuan lebih besar dibandingkan kelompok kontrol. Pola ini mengindikasikan bahwa kondisi di wilayah perlakuan memburuk lebih cepat dibandingkan wilayah pembanding.

Dalam laporan ini, kategori A–C diinterpretasikan sebagai indikasi dampak positif, kategori D sebagai tidak adanya dampak yang terdeteksi, dan kategori E–G sebagai indikasi dampak negatif. Meskipun demikian, interpretasi akhir tetap mempertimbangkan besarnya nilai perubahan, variasi data yang ditunjukkan oleh *error bar*, serta signifikansi statistik dari hasil analisis yang diperoleh.

STATUS, TREN & DAMPAK PADA INDIKATOR UTAMA SOSIAL

KESEJAHTERAAN EKONOMI | INDEKS MATERIAL ASET RUMAH TANGGA



Keterangan: Data Dasar (Tahun 2011); Pengulangan ke-2 (Tahun 2013); Pengulangan ke-3 (Tahun 2015); Pengulangan ke-4 (Tahun 2017); Pengulangan ke-5 (Tahun 2021); Pengulangan ke-6 (Tahun 2025)

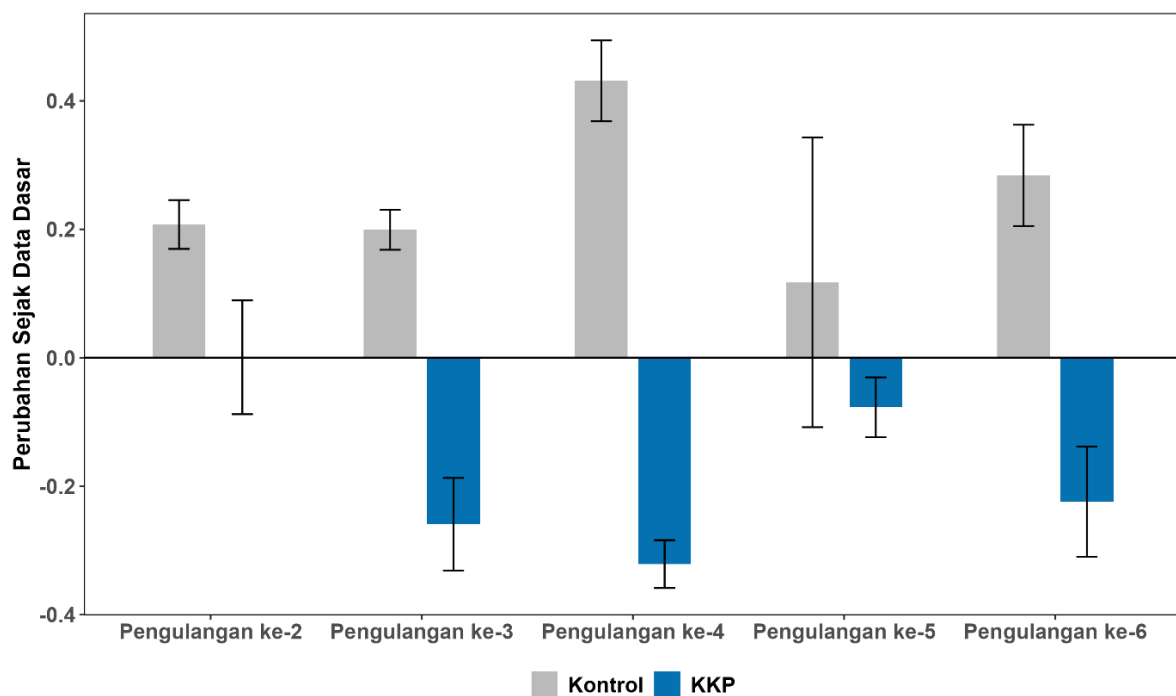
Gambar 3. Status dan Tren Kesejahteraan Ekonomi (Indikator Material Aset Rumah Tangga) KKP Kepulauan Kofiau-Boo 2025

STATUS DAN TREN

Pada tahun 2025, indeks kepemilikan aset rumah tangga di KKP Kepulauan Kofiau-Boo mencapai 18,34, lebih tinggi dibandingkan wilayah kontrol yang mencapai 17,09. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga di dalam KKP masih relatif lebih baik dibandingkan rumah tangga di luar kawasan. Selama periode pemantauan, indeks aset rumah tangga di KKP meningkat dari 21,55 pada tahun 2011 menjadi 23,10 pada tahun 2013, kemudian menurun secara bertahap menjadi 22,07 pada tahun 2015, 20,18 pada tahun 2018, dan 18,34 pada tahun 2025. Sementara itu, wilayah kontrol menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari 13,20 pada tahun 2011 menjadi 19,69 pada tahun 2018, sebelum menurun menjadi 15,20 pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 17,09 pada tahun 2025. Meskipun kedua wilayah mengalami fluktuasi, rumah tangga di KKP secara konsisten memiliki nilai indeks aset yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga di wilayah kontrol sepanjang periode pemantauan.

Perubahan indeks aset rumah tangga kemungkinan dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga untuk memperoleh dan mempertahankan aset yang dimiliki, termasuk perangkat elektronik, alat komunikasi, sumber energi, sarana transportasi, serta aset produktif seperti

perahu dan peralatan perikanan. Peningkatan indeks pada periode awal pemantauan mungkin berkaitan dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga dari kegiatan perikanan maupun komoditas perkebunan seperti kopra, serta adanya bantuan aset dari pemerintah atau lembaga lain. Sebaliknya, penurunan yang terjadi setelah tahun 2013 dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga kopra, perubahan hasil tangkapan dan musim penangkapan ikan yang memengaruhi pendapatan rumah tangga, serta berkurangnya kemampuan untuk mengganti atau menambah aset yang telah rusak. Selain itu, perkembangan akses pasar dan meningkatnya jumlah pedagang pengumpul hasil laut kemungkinan turut mendukung kemampuan rumah tangga mempertahankan aset mereka, meskipun tekanan ekonomi dan perubahan kebutuhan rumah tangga tetap dapat memengaruhi tingkat kepemilikan aset dari waktu ke waktu.



Keterangan: Data Dasar (Tahun 2011); Pengulangan ke-2 (Tahun 2013); Pengulangan ke-3 (Tahun 2015); Pengulangan ke-4 (Tahun 2017); Pengulangan ke-5 (Tahun 2021); Pengulangan ke-6 (Tahun 2025)

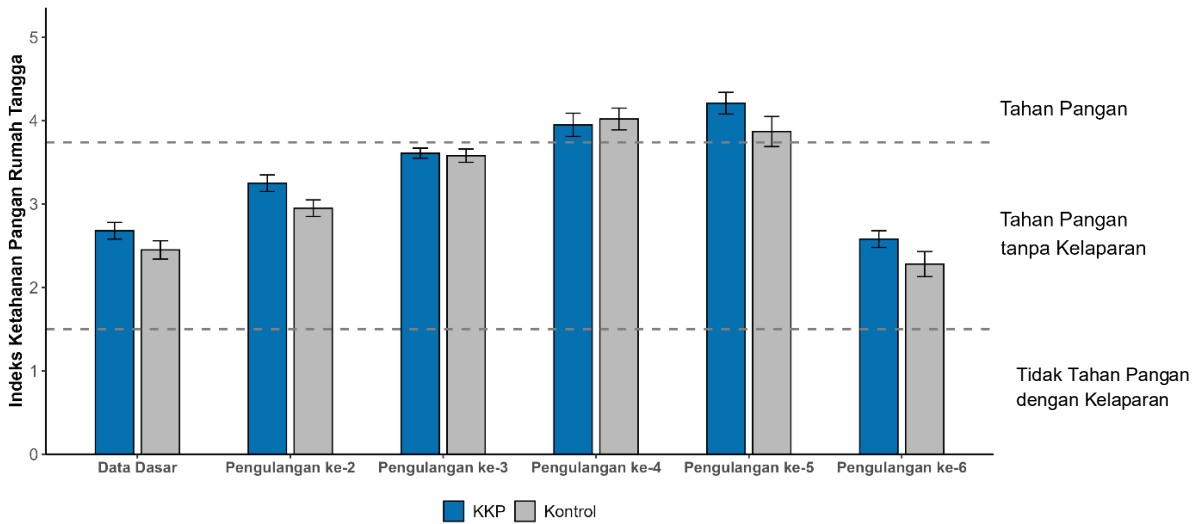
Gambar 4. Dampak Kesejahteraan Ekonomi (Indikator Material Aset Rumah Tangga) KKP Kepulauan Kofiau-Boo 2025

DAMPAK

Analisis dampak menunjukkan bahwa KKP Kepulauan Kofiau-Boo berasosiasi dengan perubahan kepemilikan aset rumah tangga yang lebih rendah dibandingkan wilayah kontrol pada beberapa periode pemantauan. Berdasarkan tipologi dampak, hasil ini termasuk kategori merugikan (*harming*), yaitu ketika rumah tangga di wilayah KKP mengalami penurunan kepemilikan aset, sementara rumah tangga di wilayah kontrol menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi dasar.

Dampak negatif mulai terlihat pada tahun 2013 ($p = 0,056$), kemudian menjadi signifikan pada tahun 2015 ($p < 0,001$), semakin kuat pada tahun 2018 ($p < 0,001$), dan kembali terdeteksi pada tahun 2025 ($p = 0,004$). Pada tahun 2021, arah dampak masih negatif, namun tidak signifikan secara statistik ($p = 0,388$). Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa perubahan kepemilikan aset rumah tangga di KKP cenderung lebih rendah dibandingkan perubahan yang terjadi pada rumah tangga kontrol selama periode pemantauan. Meskipun demikian, rumah tangga di KKP tetap memiliki tingkat kepemilikan aset yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga di wilayah kontrol pada tahun 2025. Dengan demikian, dampak yang terdeteksi tidak menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan ekonomi rumah tangga di KKP lebih buruk daripada wilayah kontrol, melainkan menunjukkan bahwa peningkatan atau kemampuan mempertahankan aset rumah tangga di KKP berlangsung lebih lambat dibandingkan wilayah pembanding selama periode pemantauan.

Perubahan kepemilikan aset rumah tangga kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan rumah tangga untuk memperoleh dan mempertahankan aset produktif maupun aset rumah tangga. Fluktuasi harga komoditas seperti kopra, variasi hasil tangkapan ikan, kondisi musim yang memengaruhi aktivitas melaut, serta akses terhadap pasar dapat memengaruhi pendapatan dan kemampuan rumah tangga untuk berinvestasi pada aset baru. Selain itu, bantuan aset dari pemerintah atau lembaga mitra, seperti perahu dan peralatan perikanan, juga dapat berkontribusi terhadap perubahan kepemilikan aset pada periode tertentu. Pembangunan infrastruktur kampung, termasuk ketersediaan listrik, jaringan telekomunikasi, dan internet, turut mendorong peningkatan kepemilikan aset seperti telepon genggam, peralatan elektronik, dan kendaraan bermotor. Sebaliknya, menurunnya kemampuan ekonomi rumah tangga atau bertambahnya aset yang rusak dan tidak tergantikan dapat menyebabkan penurunan nilai indeks aset dari waktu ke waktu.



Keterangan: Data Dasar (Tahun 2011); Pengulangan ke-2 (Tahun 2013); Pengulangan ke-3 (Tahun 2015); Pengulangan ke-4 (Tahun 2017); Pengulangan ke-5 (Tahun 2021); Pengulangan ke-6 (Tahun 2025)

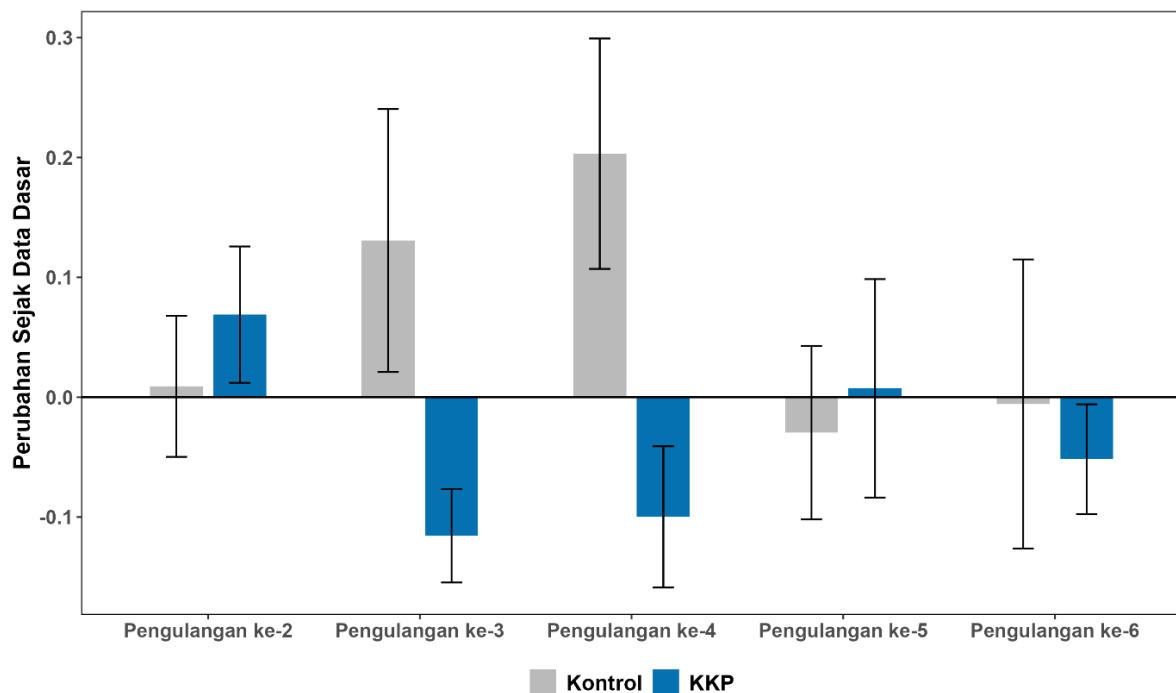
Gambar 5. Status dan Tren Kesehatan (Indikator Ketahanan Pangan Rumah Tangga) KKP Kepulauan Kofiau-Boo 2025

STATUS DAN TREN

Pada tahun 2025, indeks ketahanan pangan rumah tangga di KKP Kepulauan Kofiau-Boo mencapai 2,58, lebih tinggi dibandingkan wilayah kontrol yang mencapai 2,28. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga di kedua wilayah masih berada pada kategori tidak tahan pangan tanpa kelaparan, yaitu kondisi ketika rumah tangga mulai mengalami kekhawatiran terhadap kecukupan pangan dan melakukan penyesuaian konsumsi, terutama pada kualitas makanan yang dikonsumsi. Selama periode pemantauan, indeks ketahanan pangan rumah tangga di KKP meningkat dari 2,68 pada tahun 2011 menjadi 3,25 pada tahun 2013 dan 3,61 pada tahun 2015, kemudian mencapai kategori tahan pangan pada tahun 2018 (Indeks 3,95) dan 2021 (Indeks 4,21). Pola yang serupa juga terlihat di wilayah kontrol, yang meningkat dari 2,45 pada tahun 2011 menjadi 4,02 pada tahun 2018 dan 3,87 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup tajam di kedua wilayah sehingga status ketahanan pangan kembali berada pada kategori tidak tahan pangan tanpa kelaparan. Meskipun demikian, sepanjang periode pemantauan nilai indeks di KKP umumnya sedikit lebih tinggi dibandingkan wilayah kontrol.

Perubahan ketahanan pangan rumah tangga kemungkinan dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan, baik secara langsung melalui hasil tangkapan laut maupun secara tidak langsung melalui pendapatan yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Peningkatan indeks hingga tahun 2021 mungkin mencerminkan membaiknya akses

rumah tangga terhadap pangan yang didukung oleh pendapatan dari komoditas pertanian seperti kopra, hasil perikanan, serta semakin baiknya akses pasar dan distribusi pangan. Selain itu, pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021, berbagai program bantuan pemerintah dan lembaga lain, baik dalam bentuk bahan pangan maupun bantuan tunai, kemungkinan turut membantu rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan sehingga berkontribusi terhadap tingginya tingkat ketahanan pangan pada periode tersebut. Sebaliknya, penurunan indeks pada tahun 2025 mungkin menunjukkan menurunnya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan akibat fluktuasi pendapatan, terutama ketika harga jual kopra menurun, hasil tangkapan berkurang, atau kondisi musim membatasi aktivitas melaut. Selain itu, meningkatnya biaya kebutuhan rumah tangga dapat mengurangi daya beli pangan. Mengingat sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sumber daya laut sebagai sumber pangan dan pendapatan, perubahan kondisi perikanan, akses pasar, dan peluang memperoleh pendapatan tunai kemungkinan turut memengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga dari waktu ke waktu.



Keterangan: Data Dasar (Tahun 2011); Pengulangan ke-2 (Tahun 2013); Pengulangan ke-3 (Tahun 2015); Pengulangan ke-4 (Tahun 2017); Pengulangan ke-5 (Tahun 2021); Pengulangan ke-6 (Tahun 2025)

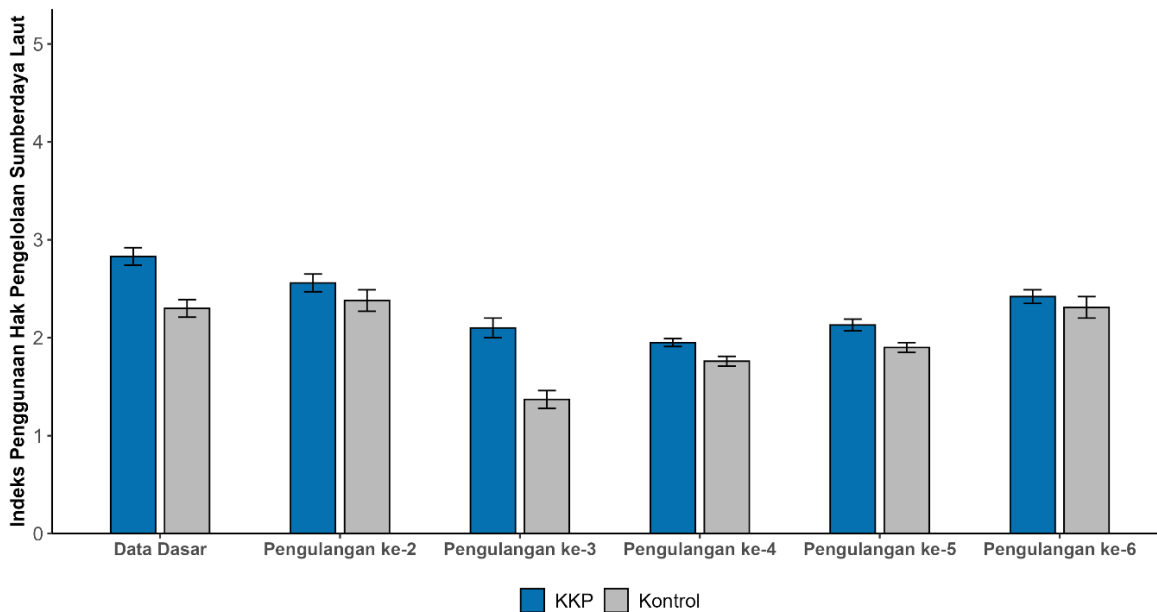
Gambar 6. Dampak Kesehatan (Indikator Ketahanan Pangan Rumah Tangga) KKP Kepulauan Kofiau-Boo 2025

DAMPAK

Analisis dampak tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari KKP Kepulauan Kofiau-Boo terhadap ketahanan pangan rumah tangga selama periode pemantauan ($p > 0,05$). Dengan demikian, tidak terdapat pola dampak yang konsisten yang dapat dikaitkan dengan keberadaan kawasan konservasi. Meskipun demikian, arah dampak menunjukkan

variasi antarperiode. Pada tahun 2013, perubahan ketahanan pangan rumah tangga di KKP cenderung lebih baik dibandingkan wilayah kontrol. Sebaliknya, pada tahun 2015 dan 2018 perubahan di KKP cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah kontrol, dengan dampak negatif terbesar teramati pada tahun 2018 ($p = 0,054$), yang signifikan pada taraf nyata 10%. Pada tahun 2021 arah dampak kembali positif, meskipun besarnya perubahan relatif kecil dan tidak signifikan secara statistik. Sementara itu, pada tahun 2025 kedua kelompok mengalami penurunan, dengan penurunan di KKP sedikit lebih besar dibandingkan wilayah kontrol.

Secara keseluruhan, variasi arah dampak antarperiode menunjukkan bahwa perubahan ketahanan pangan rumah tangga di KKP tidak berbeda secara nyata dibandingkan perubahan yang terjadi pada rumah tangga kontrol. Kondisi ini kemungkinan karena ketahanan pangan di Kofiau-Boo lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan lingkungan yang memengaruhi seluruh wilayah, baik di dalam maupun di luar KKP. Sebagian besar rumah tangga masih bergantung pada pendapatan dari kopra dan perikanan, sehingga fluktuasi harga kopra, hasil tangkapan, kondisi musim, akses pasar, serta biaya kebutuhan pokok turut memengaruhi kemampuan rumah tangga memperoleh pangan yang cukup dan bergizi. Peningkatan ketahanan pangan hingga tahun 2021 kemungkinan didukung oleh kombinasi pendapatan dari kopra dan perikanan, akses pasar yang lebih baik, serta bantuan pangan dan bantuan tunai selama pandemi COVID-19. Sebaliknya, penurunan pada tahun 2025 mungkin mencerminkan berkurangnya dukungan bantuan tersebut, disertai fluktuasi pendapatan rumah tangga dan perubahan kondisi perikanan yang memengaruhi kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan.



Keterangan: *Data Dasar (Tahun 2011); Pengulangan ke-2 (Tahun 2013); Pengulangan ke-3 (Tahun 2015); Pengulangan ke-4 (Tahun 2017); Pengulangan ke-5 (Tahun 2021); Pengulangan ke-6 (Tahun 2025)*

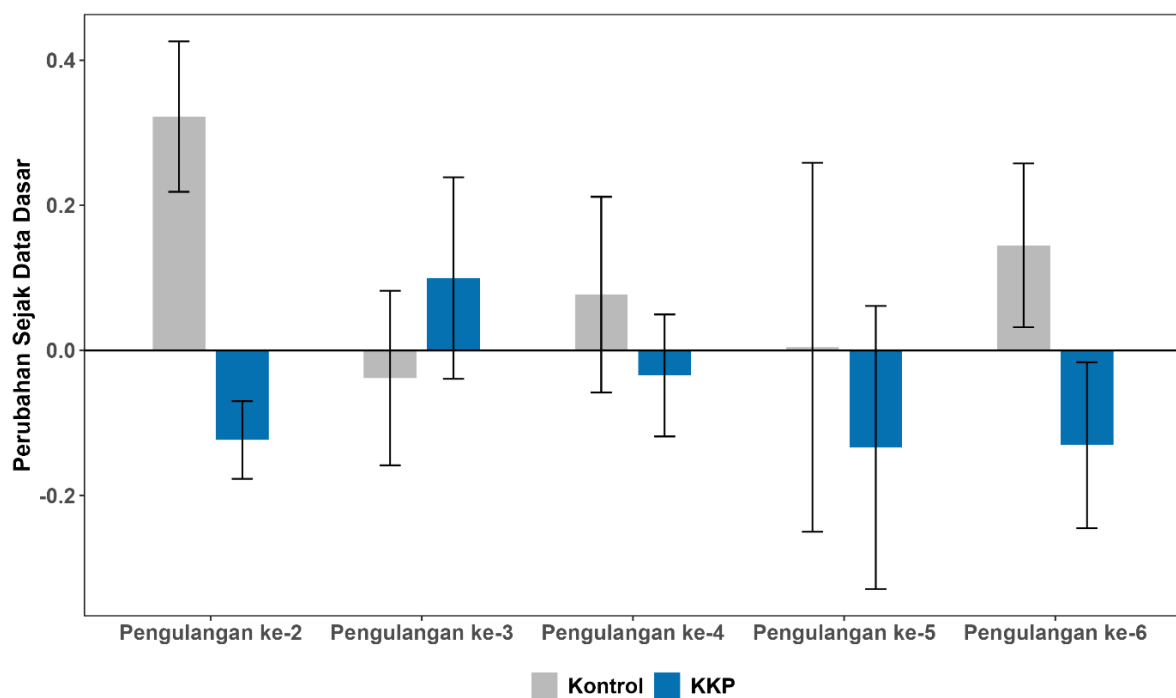
Gambar 7. Status dan Tren Pemberdayaan Politik (Indikator Hak Pengelolaan Sumber Daya Laut) KKP Kepulauan Kofiau-Boo 2025

STATUS DAN TREN

Pada tahun 2025, indeks hak pengelolaan sumber daya laut rumah tangga di KKP Kepulauan Kofiau-Boo mencapai 2,42, sedikit lebih tinggi dibandingkan wilayah kontrol yang mencapai 2,31. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi rumah tangga dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait sumber daya laut masih berada pada tingkat sedang. Selama periode pemantauan, indeks hak pengelolaan di KKP menurun dari 2,83 pada tahun 2011 menjadi 2,56 pada tahun 2013 dan mencapai titik terendah pada tahun 2018 (Indeks 1,95), sebelum meningkat kembali menjadi 2,13 pada tahun 2021 dan 2,42 pada tahun 2025. Pola yang serupa juga terlihat di wilayah kontrol, yang meningkat sedikit dari 2,30 pada tahun 2011 menjadi 2,38 pada tahun 2013, kemudian menurun hingga 1,37 pada tahun 2015 sebelum kembali meningkat menjadi 2,31 pada tahun 2025. Meskipun kedua wilayah mengalami fluktuasi, nilai indeks di KKP secara konsisten lebih tinggi dibandingkan wilayah kontrol sepanjang periode pemantauan.

Perubahan persepsi terhadap hak pengelolaan sumber daya laut kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya laut, kekuatan kelembagaan lokal dan adat, serta peluang masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Penurunan indeks

yang terjadi hingga tahun 2018 mungkin mencerminkan berkurangnya persepsi masyarakat terhadap hak dan keterlibatan mereka dalam tata kelola sumber daya laut. Sebaliknya, peningkatan yang terjadi setelah tahun 2018 dapat menunjukkan menguatnya kembali partisipasi masyarakat melalui berbagai forum kampung, kelompok pengelola, maupun kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Meskipun demikian, nilai indeks yang umumnya berada pada kisaran 2–3 dari skala 0–5 menunjukkan bahwa hak yang paling banyak dirasakan masyarakat masih berkaitan dengan akses dan pemanfaatan sumber daya laut, sedangkan keterlibatan dalam penetapan aturan, pengambilan keputusan, dan pengendalian pengelolaan sumber daya laut masih relatif terbatas.



Keterangan: *Data Dasar (Tahun 2011); Pengulangan ke-2 (Tahun 2013); Pengulangan ke-3 (Tahun 2015); Pengulangan ke-4 (Tahun 2017); Pengulangan ke-5 (Tahun 2021); Pengulangan ke-6 (Tahun 2025)*

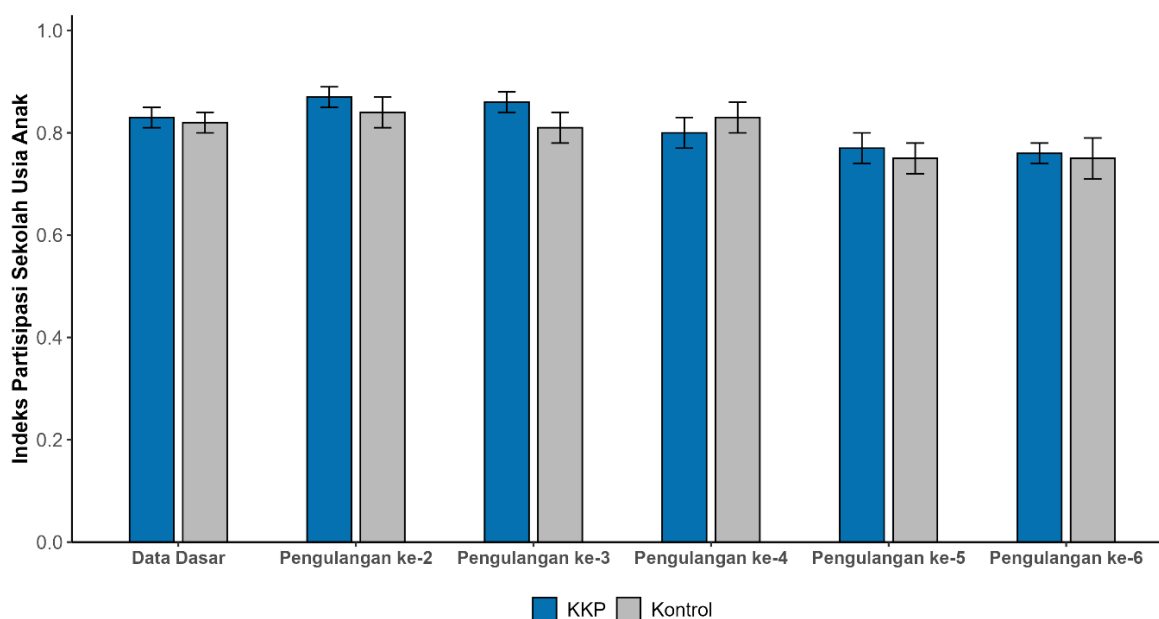
Gambar 8. Dampak Pemberdayaan Politik (Indikator Hak Pengelolaan Sumber Daya Laut) KKP Kepulauan Kofiau-Boo 2025

DAMPAK

Analisis dampak menunjukkan bahwa KKP Kepulauan Kofiau-Boo hanya berasosiasi dengan perubahan hak pengelolaan sumber daya laut pada periode awal pemantauan. Dampak negatif yang signifikan terdeteksi pada tahun 2013 ($p = 0,011$), yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi rumah tangga dalam akses, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya laut di wilayah KKP menurun, sementara wilayah kontrol mengalami peningkatan dibandingkan kondisi dasar.

Namun, pada periode-periode berikutnya (2015, 2018, 2021, dan 2025), tidak ditemukan dampak yang signifikan secara statistik ($p > 0,05$). Meskipun arah perubahan berfluktuasi antara positif dan negatif, besarnya perubahan relatif kecil dan tidak menunjukkan pola yang konsisten. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa perubahan hak pengelolaan sumber daya laut di KKP tidak berbeda secara nyata dibandingkan wilayah kontrol selama sebagian besar periode pemantauan. Dengan demikian, dampak yang terdeteksi lebih tepat dipahami sebagai indikasi dampak negatif pada periode awal pemantauan, bukan sebagai dampak yang kuat dan berkelanjutan sepanjang periode evaluasi. Hasil ini menunjukkan bahwa penyesuaian awal terhadap sistem pengelolaan kawasan kemungkinan memengaruhi persepsi masyarakat mengenai hak akses dan pemanfaatan sumber daya laut. Namun, seiring berjalannya waktu, pengaruh tersebut tampaknya berkurang, sehingga tidak lagi terlihat perbedaan yang jelas antara wilayah KKP dan kontrol pada periode-periode berikutnya.

Perubahan persepsi terhadap hak pengelolaan sumber daya laut kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan tata kelola sumber daya laut dari waktu ke waktu. Pada periode awal pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi, perubahan aturan, penyesuaian mekanisme pengelolaan, atau meningkatnya pembatasan terhadap aktivitas tertentu mungkin memengaruhi persepsi masyarakat mengenai hak mereka terhadap sumber daya laut. Selain itu, tingkat partisipasi dalam kelembagaan lokal, pengelolaan berbasis adat, forum kampung, serta program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dapat memengaruhi sejauh mana masyarakat merasa memiliki akses dan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Mengingat sebagian besar nilai indeks berada pada kisaran yang mencerminkan hak akses dan pemanfaatan sumber daya laut, perubahan yang terukur kemungkinan lebih menggambarkan perubahan persepsi terhadap akses dan penggunaan sumber daya laut dibandingkan perubahan hak yang lebih tinggi, seperti kewenangan dalam penetapan aturan atau pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya laut.



Keterangan: Data Dasar (Tahun 2011); Pengulangan ke-2 (Tahun 2013); Pengulangan ke-3 (Tahun 2015); Pengulangan ke-4 (Tahun 2017); Pengulangan ke-5 (Tahun 2021); Pengulangan ke-6 (Tahun 2025)

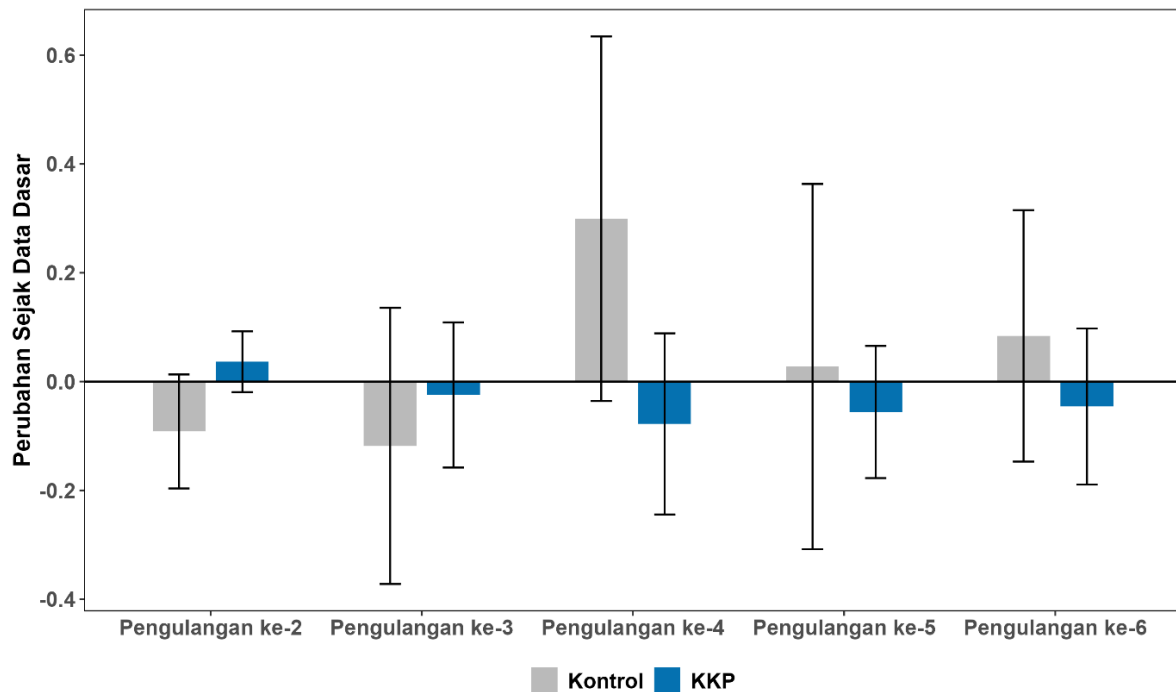
Gambar 9. Status dan Tren Pendidikan (Indikator Partisipasi Sekolah) KKP Kepulauan Kofiau-Boo 2025

STATUS DAN TREN

Pada tahun 2025, indeks partisipasi sekolah anak usia sekolah di KKP Kepulauan Kofiau-Boo mencapai 0,76, sedikit lebih tinggi dibandingkan wilayah kontrol yang mencapai 0,75. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah (5–18 tahun) di kedua wilayah masih mengikuti pendidikan formal. Selama periode pemantauan, indeks partisipasi sekolah di KKP meningkat dari 0,83 pada tahun 2011 menjadi 0,87 pada tahun 2013, kemudian menurun secara bertahap menjadi 0,86 pada tahun 2015, 0,80 pada tahun 2018, 0,77 pada tahun 2021, dan 0,76 pada tahun 2025. Pola yang serupa juga terlihat di wilayah kontrol, di mana indeks meningkat dari 0,82 pada tahun 2011 menjadi 0,84 pada tahun 2013, kemudian menurun menjadi 0,81 pada tahun 2015, 0,83 pada tahun 2018, dan 0,75 pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan di kedua wilayah, perbedaan antara KKP dan kontrol relatif kecil sepanjang periode pemantauan.

Perubahan tingkat partisipasi sekolah kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi akses dan keberlanjutan pendidikan anak. Kondisi ekonomi rumah tangga dapat memengaruhi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan, terutama ketika anak harus melanjutkan sekolah ke kampung lain atau pusat distrik yang memiliki fasilitas pendidikan lebih lengkap. Selain itu, jumlah anak usia sekolah dalam rumah tangga,

ketersediaan fasilitas pendidikan, serta perubahan komposisi umur anak pada saat survei dilakukan juga dapat memengaruhi nilai indeks yang terukur. Meskipun sekolah dasar umumnya tersedia di sebagian besar kampung, akses terhadap pendidikan menengah pertama dan menengah atas masih relatif terbatas di beberapa wilayah, sehingga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak pada jenjang yang lebih tinggi.



Keterangan: Data Dasar (Tahun 2011); Pengulangan ke-2 (Tahun 2013); Pengulangan ke-3 (Tahun 2015); Pengulangan ke-4 (Tahun 2017); Pengulangan ke-5 (Tahun 2021); Pengulangan ke-6 (Tahun 2025)

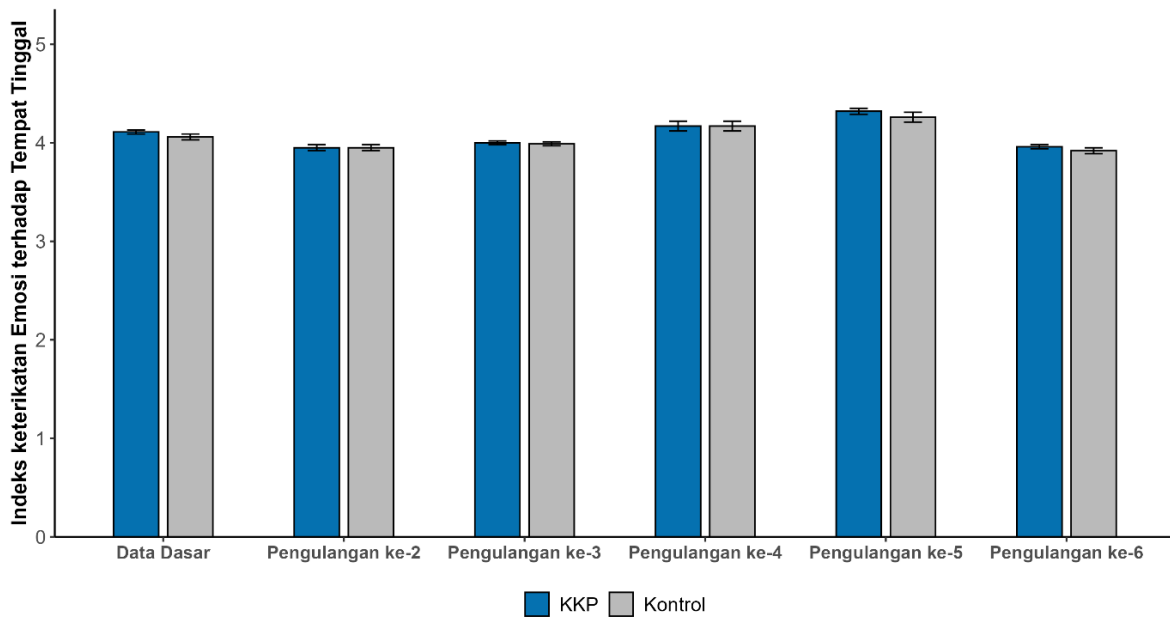
Gambar 10. Dampak Pendidikan (Indikator Partisipasi Sekolah) KKP Kepulauan Kofiau-Boo 2025

DAMPAK

Analisis dampak tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari KKP Kepulauan Kofiau-Boo terhadap tingkat partisipasi sekolah anak usia sekolah selama periode pemantauan ($p > 0,05$). Berdasarkan tipologi dampak, hasil ini lebih tepat dikategorikan sebagai tidak ada dampak yang terdeteksi, karena perubahan tingkat partisipasi sekolah di wilayah KKP dan kontrol relatif serupa sepanjang periode pemantauan. Meskipun demikian, arah perubahan menunjukkan variasi yang kecil dari waktu ke waktu. Pada tahun 2013 dan 2015, partisipasi sekolah di KKP cenderung meningkat sedikit lebih baik dibandingkan wilayah kontrol, sedangkan pada tahun 2018, 2021, dan 2025 arah perubahan cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah kontrol. Namun, seluruh perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat partisipasi sekolah anak usia sekolah di KKP tidak berbeda secara nyata dibandingkan

perubahan yang terjadi pada rumah tangga kontrol, sehingga tidak terdapat bukti bahwa perubahan tersebut secara langsung dipengaruhi oleh keberadaan kawasan konservasi.

Perubahan tingkat partisipasi sekolah kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi akses dan keberlanjutan pendidikan anak. Kondisi ekonomi rumah tangga dapat memengaruhi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan, terutama ketika anak harus melanjutkan sekolah ke kampung lain atau pusat distrik yang memiliki fasilitas pendidikan lebih lengkap. Selain itu, jumlah anak usia sekolah dalam rumah tangga, ketersediaan fasilitas pendidikan, serta perubahan komposisi umur anak pada saat survei dilakukan juga dapat memengaruhi nilai indeks yang terukur. Mengingat pola perubahan yang relatif serupa antara KKP dan wilayah kontrol, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan ketersediaan layanan pendidikan kemungkinan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat partisipasi sekolah dibandingkan keberadaan kawasan konservasi itu sendiri.



Keterangan: Data Dasar (Tahun 2011); Pengulangan ke-2 (Tahun 2013); Pengulangan ke-3 (Tahun 2015); Pengulangan ke-4 (Tahun 2017); Pengulangan ke-5 (Tahun 2021); Pengulangan ke-6 (Tahun 2025)

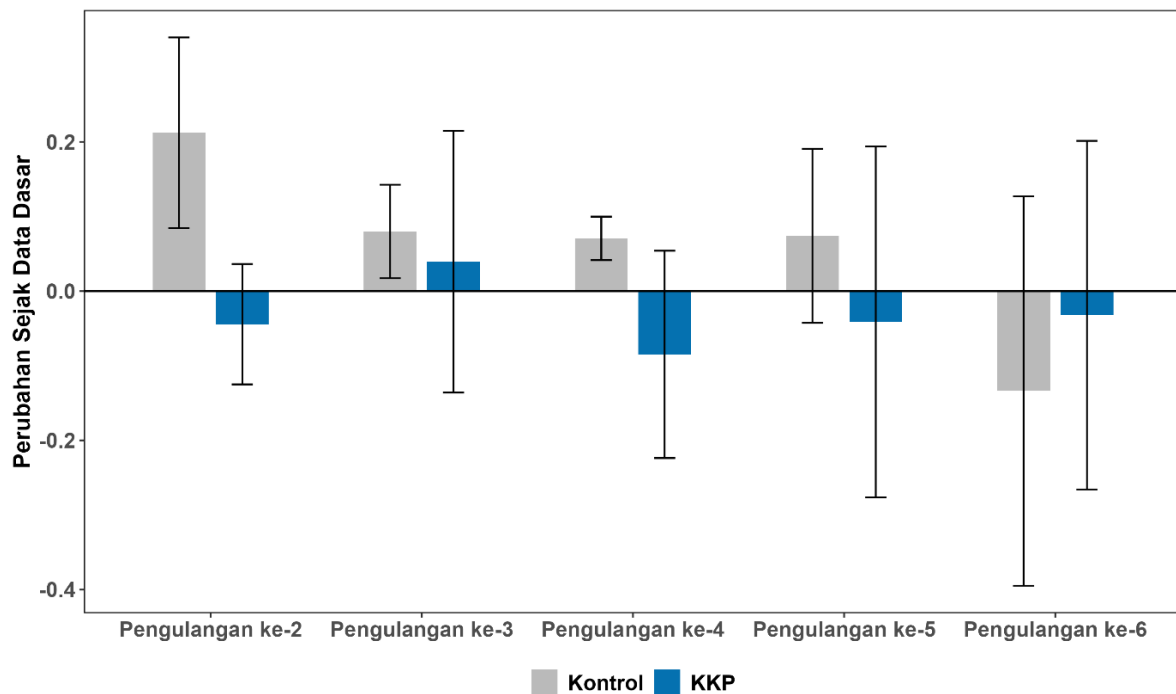
Gambar 11. Status dan Tren Budaya (Indikator Keterikatan terhadap Tempat) KKP Kepulauan Kofiau-Boo 2025

STATUS DAN TREN

Pada tahun 2025, indeks keterikatan emosional terhadap tempat atau perairan laut lokal di KKP Kepulauan Kofiau-Boo mencapai 3,96, sedikit lebih tinggi dibandingkan wilayah kontrol yang mencapai 3,92. Nilai tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di kedua wilayah memiliki keterikatan yang relatif kuat terhadap wilayah laut dan tempat tinggal mereka. Selama periode pemantauan, indeks keterikatan emosional di KKP relatif stabil, dengan nilai berkisar antara 3,95 hingga 4,32. Nilai indeks meningkat dari 4,11 pada tahun 2011 menjadi 4,32 pada tahun 2021, sebelum menurun menjadi 3,96 pada tahun 2025. Pola yang hampir sama juga terlihat di wilayah kontrol, di mana indeks meningkat dari 4,06 pada tahun 2011 menjadi 4,26 pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 3,92 pada tahun 2025. Sepanjang periode pemantauan, perbedaan antara KKP dan kontrol relatif kecil, menunjukkan bahwa tingkat keterikatan masyarakat terhadap wilayah laut lokal tetap tinggi baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi.

Tingginya keterikatan emosional terhadap wilayah laut lokal kemungkinan dipengaruhi oleh hubungan jangka panjang masyarakat dengan lingkungan pesisir dan laut sebagai bagian dari identitas sosial, budaya, dan sumber penghidupan mereka. Faktor-faktor seperti lama tinggal di kampung, hubungan kekerabatan dan hak adat, serta ketergantungan pada sumber daya

laut dapat memperkuat rasa memiliki terhadap wilayah laut setempat. Di sisi lain, meningkatnya akses transportasi, komunikasi, pendidikan, dan informasi dari luar kampung dapat memengaruhi cara masyarakat memandang hubungan mereka dengan wilayah lokal. Meskipun demikian, nilai indeks yang tetap tinggi sepanjang periode pemantauan menunjukkan bahwa laut masih memiliki makna sosial, budaya, dan ekonomi yang penting bagi masyarakat Kepulauan Kofiau-Boo.



Keterangan: Data Dasar (Tahun 2011); Pengulangan ke-2 (Tahun 2013); Pengulangan ke-3 (Tahun 2015); Pengulangan ke-4 (Tahun 2017); Pengulangan ke-5 (Tahun 2021); Pengulangan ke-6 (Tahun 2025)

Gambar 12. Dampak Budaya (Indikator Keterikatan terhadap Tempat) KKP Kepulauan Kofiau-Boo 2025

DAMPAK

Analisis dampak tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari KKP Kepulauan Kofiau-Boo terhadap keterikatan emosional masyarakat terhadap tempat atau wilayah laut lokal selama periode pemantauan ($p > 0,05$). Berdasarkan tipologi dampak, hasil ini lebih tepat dikategorikan sebagai tidak ada dampak yang terdeteksi, karena perubahan tingkat keterikatan emosional di wilayah KKP dan kontrol relatif serupa sepanjang periode pemantauan. Meskipun demikian, arah perubahan menunjukkan variasi yang kecil dari waktu ke waktu. Pada tahun 2013, 2015, 2018, dan 2021, perubahan di KKP cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah kontrol, sedangkan pada tahun 2025 perubahan di KKP sedikit lebih baik dibandingkan wilayah kontrol. Namun seluruh perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat keterikatan emosional terhadap wilayah laut lokal di KKP tidak berbeda secara nyata dibandingkan

wilayah kontrol, sehingga tidak terdapat bukti bahwa keberadaan kawasan konservasi secara langsung memengaruhi keterikatan masyarakat terhadap tempat.

Tingkat keterikatan emosional terhadap wilayah laut lokal kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan sejarah yang relatif stabil dibandingkan faktor-faktor yang terkait langsung dengan pengelolaan kawasan konservasi. Lama tinggal di kampung, hubungan kekerabatan, identitas adat, hak ulayat laut, serta ketergantungan terhadap sumber daya laut sebagai sumber penghidupan dapat membentuk hubungan emosional yang kuat antara masyarakat dan wilayah lautnya. Di sisi lain, meningkatnya akses transportasi, komunikasi, pendidikan, dan informasi dari luar kampung dapat memengaruhi cara masyarakat memandang hubungan mereka dengan lingkungan lokal. Karena tingkat keterikatan emosional di KKP dan kontrol menunjukkan pola perubahan yang relatif serupa selama periode pemantauan, hasil ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor sosial dan budaya yang lebih luas kemungkinan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap *place attachment* dibandingkan keberadaan kawasan konservasi itu sendiri.

REKOMENDASI TATA KELOLA

KESEJAHTERAAN EKONOMI (Kepemilikan Aset Rumah Tangga)

Hasil analisis menunjukkan bahwa rumah tangga di KKP Kepulauan Kofiau-Boo masih memiliki tingkat kepemilikan aset yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah kontrol. Namun demikian, laju perubahan kepemilikan aset cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah pembanding, sehingga manfaat ekonomi yang diharapkan dari keberadaan kawasan konservasi belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, pengelolaan KKP perlu lebih diarahkan pada penguatan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui diversifikasi mata pencaharian, peningkatan nilai tambah hasil perikanan dan produk lokal, penguatan akses pasar, serta pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal. Dukungan terhadap infrastruktur ekonomi, akses transportasi dan komunikasi, serta pengembangan rantai nilai perikanan dan hasil laut juga perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari pengelolaan kawasan.

KESEHATAN (Ketahanan Pangan Rumah Tangga)

Ketahanan pangan rumah tangga di wilayah KKP dan kontrol menunjukkan pola perubahan yang relatif serupa selama periode pemantauan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketahanan pangan masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kondisi perikanan, harga komoditas, akses pasar, dan dukungan sosial yang memengaruhi seluruh wilayah Kofiau-Boo. Oleh karena itu, pengelolaan KKP perlu berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, pengembangan sumber penghidupan alternatif, serta peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga. Pemantauan terhadap kondisi sumber daya laut, kerentanan ekonomi, dan akses pangan masyarakat juga perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kelompok yang paling rentan terhadap gangguan ketahanan pangan.

PEMBERDAYAAN POLITIK (Hak Pengelolaan Sumber Daya Laut)

Meskipun dampak negatif hanya terdeteksi pada periode awal pemantauan, hasil ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa masyarakat tetap merasa memiliki akses, peran, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya laut. Oleh karena itu, pengelolaan KKP perlu terus memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan kawasan. Pengakuan terhadap sistem hak adat, wilayah kelola tradisional, serta pengetahuan lokal perlu terus dipertahankan dan diperkuat. Selain itu, komunikasi yang terbuka mengenai aturan kawasan, tujuan pengelolaan, dan peran masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tetap merasa menjadi bagian dari proses pengelolaan kawasan konservasi.

PENDIDIKAN (Angka Partisipasi Anak Usia Sekolah)

Tingkat partisipasi sekolah di Kepulauan Kofiau-Boo relatif tinggi dan tidak menunjukkan perbedaan yang berarti antara wilayah KKP dan kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu, peran KKP lebih tepat diarahkan sebagai pendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan lingkungan, literasi kelautan, dan penguatan kapasitas generasi muda. Kerja sama dengan sekolah, pemerintah daerah, dan kampung perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai konservasi, pengelolaan sumber daya alam, dan peluang ekonomi berkelanjutan yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat di masa depan.

BUDAYA (Keterikatan Emosional terhadap Wilayah Laut Lokal)

Tingkat keterikatan masyarakat terhadap wilayah laut lokal tetap tinggi sepanjang periode pemantauan dan tidak menunjukkan perubahan yang berbeda antara wilayah KKP dan kontrol. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan sosial, budaya, dan historis masyarakat dengan laut masih terjaga dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan KKP perlu terus mendukung pelestarian nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan laut melalui penguatan kelembagaan adat, dokumentasi pengetahuan lokal, pemetaan wilayah adat, serta pelibatan generasi muda dalam kegiatan budaya dan konservasi. Pengelolaan kawasan juga perlu memastikan bahwa kebijakan dan praktik konservasi tetap menghormati hak adat, nilai budaya, dan hubungan masyarakat dengan wilayah kelola tradisional.

